



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara RepNublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Oragnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Oragnisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Biaya yang bersifat Umum adalah yang selanjutnya disebut standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan tentang standar biaya adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran SKPD.

BAB III STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja.
 - b. batas tertinggi atau estimasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar Biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan penggunaannya dijelaskan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya dan standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan usulan kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan satuan biaya dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sesuai dengan beban kerja dan out put nya.

Pasal 5

- (1) Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan out put yang dihasilkan.
- (2) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Bupati / Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar untuk membayar.

- (3) Penganggaran biaya honorarium dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat diberlakukan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 61

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2015
TANGGAL 16 Desember 2015

DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN BANJAR

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|----|--|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN | | |
| | 1.1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN | | |
| | a. Nilai pagu dana < Rp.500 jt | OB | 400.000 |
| | b. Nilai pagu dana Rp. 500 jt sd. Rp. 1 M | OB | 500.000 |
| | c. Nilai pagu dana Rp. 1M sd. Rp. 5 M | OB | 600.000 |
| | d. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd.Rp.20 M | OB | 850.000 |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 20 M | OB | 1.100.000 |
| | 1.2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | | |
| | a. Nilai pagu kegiatan < Rp.500 jt | OB | 250.000 |
| | b. Nilai pagu kegiatan Rp. 500 jt sd. Rp. 1 M | OB | 350.000 |
| | c. Nilai pagu kegiatan Rp. 1M sd. Rp. 5 M | OB | 450.000 |
| | d. Nilai pagu kegiatan Rp. 5 M sd.Rp.20 M | OB | 500.000 |
| | e. Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 20 M | OB | 600.000 |
| | 1.3. KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| | a. Nilai pagu dana < Rp.500 jt | OB | 300.000 |
| | b. Nilai pagu dana Rp. 500 jt sd. Rp. 1 M | OB | 500.000 |
| | c. Nilai pagu dana Rp. 1M sd. Rp. 5 M | OB | 850.000 |
| | d. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd.Rp.20 M | OB | 1.000.000 |
| | e. Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 20 M | OB | 1.200.000 |
| | 1.4. PEJABAT PENGELOLA PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | a. Pemegang Kekusaan Pengelolaan Keuangan Daerah | OB | 4.000.000 |
| | b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah | OB | 3.000.000 |
| | c. Bendahara Umum Daerah | OB | 2.500.000 |
| | d. Kuasa Bendahara Umum Daerah | OB | 2.000.000 |
| | e. Pembantu Bendahara Umum Daerah | OB | 1.500.000 |
| | f. Staf Pengelola Pelaksanaan Anggaran Daerah | OB | 1.250.000 |
| | 1.5. BENDAHARA PENGELUARAN | | |
| | a. Nilai pagu dana sd Rp. 1 M | OB | 500.000 |
| | b. Nilai pagu dana Rp. 1 M sd. Rp. 5 M | OB | 1.000.000 |
| | c. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd. Rp. 20 M | OB | 1.500.000 |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M | OB | 1.800.000 |
| | 1.6. STAF PENGELOLA | | |
| | a. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Setda) | OB | 700.000 |
| | b. Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu (Setda) | OB | 400.000 |
| | c. Pembantu Bendahara Pengeluaran (pagu diatas 1 M) | OB | 500.000 |
| | d. Pembantu Bendahara pengeluaran pada UPT Kesehatan | OB | 400.000 |
| | 1.7.BENDAHARA PENERIMA | | |

| | | | |
|----|--|-------|-----------|
| | a. Target sd. Rp. 100 Jt | OB | 200.000 |
| | b. Target Rp.100 Jt sd Rp. 1 M | OB | 300.000 |
| | c. Target Rp. 1 M sd. Rp. 10 M | OB | 400.000 |
| | d. Target Rp. 10 sd. 20 M lebih | OB | 700.000 |
| | e. Target diatas Rp. 20 M | OB | 1.000.000 |
| | 1.8.PENGURUS / PENYIMPAN BARANG | | |
| | a. Nilai Aset < Rp.500 jt | OB | 250.000 |
| | b. Nilai Aset Rp. 500 jt sd. Rp. 1 M | OB | 500.000 |
| | c. Nilai Aset Rp. 1M sd. Rp. 10 M | OB | 750.000 |
| | d. Nilai Aset Rp. 10 M sd.Rp.30 M | OB | 1.000.000 |
| | e. Nilai Aset Rp. 30 M | OB | 1.250.000 |
| | 1.9.PEMBANTU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG | | |
| | a. Dinas Pendidikan (UPT Diknas yang membawahi beberapa sekolah) | OB | 400.000 |
| | b. Dinas Kesehatan | OB | 400.000 |
| | c. Dinas Bina Marga dan SDA | OB | 400.000 |
| | d. Dinas Perumahan dan Permukiman | OB | 400.000 |
| | e. Dinas Pertanian Perkebunan & Perternakan | OB | 400.000 |
| | f. RSUD Ratu Zalecha | OB | 400.000 |
| | g. Bagian di lingkungan Setda Kab. Banjar | OB | 400.000 |
| | | | |
| 2. | PENGADAAN BARANG/ JASA | | |
| | 2.1 Pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 jt) | Paket | 250.000 |
| | 2.2 Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta | OB | 500.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta | OB | 750.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar | OB | 1.250.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar | OB | 1.500.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar | OB | 1.750.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar | OB | 2.000.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar | OB | 2.250.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar | OB | 2.500.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar | OB | 2.750.000 |
| | j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar | OB | 3.000.000 |
| | | | |
| | 2.3. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | | |
| | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai pagu pengadaan Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta | Paket | 200.000 |
| | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan Rp.50 juta s.d Rp.200 juta | Paket | 500.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta | Paket | 650.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar | Paket | 750.000 |

| | | | |
|----|---|-------|-----------|
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar | Paket | 850.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar | Paket | 1.000.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar | Paket | 1.250.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar | Paket | 1.500.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar | Paket | 1.750.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar | Paket | 2.000.000 |
| | | | |
| | 2.4. Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sd Rp.200 juta | OB | 200.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta | OB | 250.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar | OB | 300.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar | OB | 325.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar | OB | 350.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar | OB | 400.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar | OB | 450.000 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar | OB | 500.000 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar | OB | 600.000 |
| | | | |
| 3. | HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI KABUPATEN | | |
| | a. Penanggungjawab/ ketua | OB | 1.400.000 |
| | b. Admin | OB | 1.250.000 |
| | c. Operator | OB | 800.000 |
| | | | |
| 4. | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PANITIA SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI/ DESIMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT | | |
| | 4.1 Nara Sumber /pembahas (pusat) | | |
| | a. Menteri/setara | OJ | 1.700.000 |
| | b. Pejabat Eselon I | OJ | 1.400.000 |
| | c. Pejabat Eselon II | OJ | 1.000.000 |
| | d. Pejabat Eselon III | OJ | 900.000 |
| | e. Pejabat Eselon IV kebawah | OJ | 700.000 |
| | f. Moderator | OM | 700.000 |
| | g. Pakar /praktisi/pembicara khusus | OJ | 1.000.000 |
| | | | |
| | 4.2 Nara Sumber/pembahas (dari Provinsi) | | |
| | a. Pejabat Eselon II | OJ | 800.000 |
| | b. Pejabat Eselon III | OJ | 700.000 |
| | c. Pejabat Eselon IV kebawah | OJ | 600.000 |
| | d. Moderator | OM | 400.000 |
| | e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus | OJ | 800.000 |

| | | | |
|----|---|-----|---------|
| | 4.3 Nara Sumber/ pembahas (dari Kabupaten) | | |
| | a. Pejabat Eselon II | OJ | 750.000 |
| | b. Pejabat Eselon III | OJ | 650.000 |
| | c. Pejabat Eselon IV Kebawah | OJ | 550.000 |
| | d. Moderator | O/M | 350.000 |
| | e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus | OJ | 750.000 |
| | 4.4. Panitia Bimtek/ Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Desiminasi/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD | | |
| | a. Penanggungjawab | OK | 550.000 |
| | b. Ketua/wakil | OK | 500.000 |
| | c. Sekretaris | OK | 400.000 |
| | d. Anggota | OK | 350.000 |
| | 4.5. Panitia Diklat | | |
| | a. Penanggungjawab | OK | 800.000 |
| | b. Ketua/wakil | OK | 700.000 |
| | c. Sekretaris | OK | 600.000 |
| | d. Anggota | OK | 450.000 |
| | 4.6. Panitia Penyelenggara Kegiatan Lainnya | | |
| | a. Pengarah | OK | 600.000 |
| | b. Penanggung jawab | OK | 550.000 |
| | c. Ketua | OK | 500.000 |
| | d. Koordinator | OK | 450.000 |
| | e. Ketua Bidang | OK | 400.000 |
| | f. Sekretaris | OK | 350.000 |
| | g. Anggota Panitia | OK | 300.000 |
| | | | |
| 5. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA | | |
| | 5.1 Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati | | |
| | a. Pembina | OK | 700.000 |
| | b. Pengarah | OK | 700.000 |
| | c. Penanggung jawab | OK | 650.000 |
| | d. Koordinator/Ketua | OK | 600.000 |
| | e. Wakil Koordinator/Ketua | OK | 550.000 |
| | f. Sekretaris | OK | 400.000 |
| | g. Anggota | OK | 350.000 |
| | | | |
| | 5.2. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati | | |
| | a. Pembina | OB | 700.000 |
| | b. Pengarah | OB | 700.000 |
| | c. Penanggung jawab | OB | 650.000 |
| | d. Ketua | OB | 600.000 |
| | e. Wakil ketua | OB | 550.000 |
| | f. Sekretaris | OB | 400.000 |
| | g. Anggota | OB | 350.000 |
| | 5.3. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati | | |

| | | | |
|----|--|-----------------|---------|
| | a. Pembina | OT | 750.000 |
| | b. Pengarah | OT | 750.000 |
| | c. Penanggung jawab | OT | 700.000 |
| | d. Koordinator/Ketua | OT | 650.000 |
| | e. Wakil ketua | OT | 600.000 |
| | f. Sekretaris | OT | 500.000 |
| | g. Anggota | OT | 400.000 |
| | 5.4.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati | | |
| | a. Pembina | OS | 800.000 |
| | b. Pengarah | OS | 800.000 |
| | c. Penanggung jawab | OS | 750.000 |
| | d. Koordinator/Ketua | OS | 700.000 |
| | e. Wakil ketua | OS | 650.000 |
| | f. Sekretaris | OS | 550.000 |
| | g. Anggota | OS | 450.000 |
| | 5.5.Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati | | |
| | a. Ketua | OK/OB | 400.000 |
| | b. Sekretaris | OK/OB | 350.000 |
| | c. Anggota | OK/OB | 300.000 |
| | 5.6.Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati | | |
| | a. Ketua | OT | 450.000 |
| | b. Sekretaris | OT | 400.000 |
| | c. Anggota | OT | 350.000 |
| | 5.7.Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati | | |
| | a. Ketua | OS | 500.000 |
| | b. Sekretaris | OS | 450.000 |
| | c. Anggota | OS | 400.000 |
| | 5.8.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA | | |
| | a. Ketua | OK/OB | 400.000 |
| | b. Sekretaris | OK/OB | 350.000 |
| | c. Anggota | OK/OB | 300.000 |
| | 5.9.Sekretariat Tim ditetapkan oleh PA/ KPA | | |
| | a. Ketua | OK/OB | 300.000 |
| | b. Anggota | OK/OB | 250.000 |
| 6. | HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN TIM PENGELOLA WEBSITE | | |
| | 6.1.Tim Penyusun Buletin/jurnal/majalah | | |
| | a. Penanggung jawab | Orang/ terbitan | 250.000 |
| | b. Redaktur | Orang/ terbitan | 200.000 |
| | c. Penyunting | Orang/ terbitan | 200.000 |
| | d. Desain Grafis | Orang/ terbitan | 150.000 |
| | e. Fotografer | Orang/ terbitan | 125.000 |
| | f. Pembuat artikel | Hal | 100.000 |
| | 6.2.Tim Pengelola Website | | |
| | a. Penanggung jawab | OB | 400.000 |
| | b. Redaktur | OB | 350.000 |
| | c. Editor | OB | 300.000 |

| | | | |
|----|---|---------------------|-----------|
| | d. Web Admin | OB | 250.000 |
| | e. Pembuat Artikel | Hal | 100.000 |
| | | | |
| 7. | HONORARIUM TIM KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA) | | |
| | a. Ketua | OB | 2.500.000 |
| | b. Wakil Ketua | OB | 2.000.000 |
| | c. Pelaksana Harian dan Wakil Pelaksana Harian | OB | 1.750.000 |
| | d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris | OB | 1.500.000 |
| | e. Anggota Tim | OB | 1.000.000 |
| | f. Sekretariat | OB | 500.000 |
| | | | |
| 8. | HONORARIUM LAINNYA | | |
| | 8.1 Petugas Survey | Orang/ Responden | 7.000 |
| | 8.2 Petugas Lapangan | OH | 80.000 |
| | 8.3 Pengambil Sumpah/ Janji | OK | 500.000 |
| | 8.4 Rohaniawan | OK | 500.000 |
| | 8.5 Pembawa Acara (MC) | OK | 200.000 |
| | 8.6 Pembaca Doa | OK | 200.000 |
| | 8.7 Juri/wasit/penilai | OK | 400.000 |
| | Juri/wasit/penilai | OH | 200.000 |
| | 8.9 Petugas sensus barang | OH | 50.000 |

| | | | |
|-----|--|--------------|-----------|
| 9. | TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI ASET | | |
| | a. Ketua | OH | 500.000 |
| | b. Sekretaris | OH | 400.000 |
| | c. Anggota | OH | 350.000 |
| | | | |
| 10. | HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/ INTERNASIONAL | | |
| | a. Pengarah | OH | 550.000 |
| | b. Penanggung Jawab | OH | 500.000 |
| | c. Ketua/ Wakil Ketua | OH | 450.000 |
| | d. Ketua Delegasi | OH | 450.000 |
| | e. Tim Asistensi | OH | 450.000 |
| | f. Anggota Delegasi RI | OH | 400.000 |
| | g. Koordinator | OH | 400.000 |
| | h. Ketua Bidang | OH | 300.000 |
| | i. Sekretaris | OH | 300.000 |
| | j. Anggota Panitia | OH | 250.000 |
| | k. Liasion Officer (LO) | OH | 250.000 |
| | l. Staf Pendukung | OH | 200.000 |
| | | | |
| 11. | HONORARIUM TIM KUASA HUKUM | | |
| | 11.1 Tingkat Pertama/ Mediasi (Perdata/TUN/ HI) | | |
| | a. Ketua Tim | Org/Sidang | 300.000 |
| | b. Anggota Tim | Org/Sidang | 250.000 |
| | 11.2 Tingkat Banding (Perdata/TUN/ HI) | | |
| | a. Ketua Tim | Org/Tk.Perkr | 2.000.000 |
| | b. Anggota Tim | Org/Tk.Pekr | 1.750.000 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|------------|
| | 11.3 Tingkat Kasasi/ PK (Perdata/TUN/ HI) | | |
| | a. Ketua Tim | Org/Tk.Perkr | 2.500.000 |
| | b. Anggota Tim | Org/Tk.Perkr | 2.250.000 |
| | | | |
| 12. | HONORARIUM PENGLOLA BARANG MILIK DAERAH | | |
| | a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD | OB | 4.000.000 |
| | b. Pengelola BMD | OB | 3.000.000 |
| | c. Pembantu Pengelola BMD | OB | 2.500.000 |
| | d. Koordinator Penatausahaan BMD | OB | 2.000.000 |
| | e. Wakil Koordinator Penatausahaan BMD | OB | 1.500.000 |
| | f. Staf Penatausahaan BMD | OB | 1.250.000 |
| | | | |
| 13. | VAKASI & HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN | | |
| | 13.1. Vakasi | | |
| | a. Pendidikan Dasar - Pemeriksaan Hasil Ujian | Siswa/ mata Ujian | 5.000 |
| | b. Pendidikan Menengah - Pemeriksaan Hasil Ujian | Siswa/ mata Ujian | 7.500 |
| | 13.2. Honorarium Penyelenggara Ujian | | |
| | a. Pendidikan Dasar | | |
| | 1). Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | 150.000 |
| | 2). Pengawas Ujian | OH | 240.000 |
| | 3). Pengamanan Soal/Hasil Ujian | OH | 200.000 |
| | b. Pendidikan Menengah | | |
| | 1). Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | 190.000 |
| | 2). Pengawas Ujian | OH | 270.000 |
| | 3). Pengamanan Soal/ hasil Ujian | OH | 200.000 |
| | | | |
| 14. | SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR | | |
| | Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor | | |
| | a. Halfday | OH | 175.000 |
| | b. Fullday | OH | 295.000 |
| | c. Fullboard | OH | 750.000 |
| | | | |
| 15. | HONORARIUM TENAGA AHLI/PAKAR | | |
| | Tenaga Tenaga Ahli/Pakar | | |
| | a. Strata 3 | OB | 2.400.000 |
| | b. Strata 2 | OB | 2.000.000 |
| | c. Strata 1 | OB | 1.600.000 |
| | | | |
| 16. | SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (STANDAR KALSEL) | | |
| | 16.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil | | |
| | a. Roda 4 | Per Hari | 702.000 |
| | b. Roda 6/BUS sedang | Per Hari | 1.950.000 |
| | c. Roda 6/BUS besar | Per Hari | 3.130.000 |
| | 16.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat | | |
| | a. Pejabat Eselon II (Kalsel) | Per Bulan | 14.030.000 |
| | 16.3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor | | |

| | | | |
|-----|--|-----------------|------------|
| | dan/atau Lapangan | | |
| | a. Pickup | Per Bulan | 6.720.000 |
| | b. Minibus | Per Bulan | 6.530.000 |
| | c. Double Gardan | Per Bulan | 15.380.000 |
| 17. | HONORARIUM OPERATOR PRODUK HUKUM DAERAH | OB | 800.000 |
| 18. | SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI PESERTA (Non PNS) | | |
| | a. Peserta Sosialisasi dari Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh | Orang/Kali | 150.000 |
| | b. Peserta Sosialisai diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a | Orang/ kali | 100.000 |
| 19. | HONORARIUM PELATIH | | |
| | 1. Pelatih Senam/ Instruktur senam | OK | 200.000 |
| | 2. Pelatih Kesenian/ sejenis | OB | 400.000 |
| | 3. Pelatih Paskibraka | OH | 200.000 |
| | 4. Pelatih Olahraga / sejenis | OK | 250.000 |
| 20 | HONORARIUM PETUGAS | | |
| | 20.1. Honorarium Non PNS berdasarkan Jenis Pekerjaan | | |
| | a. Satpam/outsourcing/Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil | OB | 1.300.000 |
| | b. Petugas Keamanan Dalam Setda | OB | 2.000.000 |
| | c. Keamanan/pejaga malam/wakar | OB | 1.100.000 |
| | d. Pengemudi/Sopir | OB | 1.750.000 |
| | e. Petugas Uji Petik | Orang/ Objek | 100.000 |
| | f. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda | OB | 800.000 |
| | g. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati /Wakil Bupati | OB | 1.400.000 |
| | h. Operator Website Pemerintah Daerah | OB | 1.250.000 |
| | i. Pramubakti | OB | 1.000.000 |
| | j. Petugas Kebersihan kegiatan (event) | OH | 50.000 |
| | k. Petugas sound system kegiatan (event) | OH | 50.000 |
| | l. Petugas Keamanan kegiatan (event) | OH | 50.000 |
| | m.Petugas Piket/ Jaga kegiatan (event) | OH | 50.000 |
| | n. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/ Hari Besar Keagamaan | OK | 250.000 |
| | o. Petugas Penceramah Apel Gabungan | OK | 500.000 |
| | p. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai | OK | 1.000.000 |
| | q. Petugas Da'i/Penceramah Transmigrasi | OB | 1.500.000 |
| | r. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan | OB | 1.500.000 |
| | s. Qori kegiatan Safari Ramadhan dan Sholat Hajat | OB | 500.000 |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------|
| | 20.2. Honorarium Non PNS Berdasarkan Pekerjaan pada Dinas Pendapatan/ SKPD lainnya | | |
| | a. Operator consule | OJ | 15.000 |
| | b. Entry Data PBB dan BPHTB | OJ | 15.000 |
| | c. Front Office | OJ | 15.000 |
| | 20.3. Honorarium Non PNS berdasarkan jenis pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman/ SKPD lainnya | | |
| | a. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS > 5 tahun | OB | 1.500.000 |
| | b. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun | OB | 1.300.000 |
| | c. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja | OJ | 10.000 |
| | d. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat) | OB | 2.000.000 |
| | e. Foreman/Pengawas alat berat di TPA Cahaya Kencana | OB | 2.500.000 |
| | f. Operator alat berat di TPA. Cahaya Kencana | OB | 2.300.000 |
| | g. Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana | OB | 1.350.000 |
| | h. Pengawasa gas metan | OB | 1.350.000 |
| | i. Supir Truk Sampah | OB | 1.750.000 |
| | j. Sopir roda tiga | OB | 1.500.000 |
| | k. Penarik Retribusi | OB | 1.000.000 |
| | 20.4. Honorarium Tenaga Kontrak/Non PNS Berdasarkan Pendidikan | | |
| | a. S2 | OB | 1.900.000 |
| | b. S1/D4 > 5 Tahun | OB | 1.800.000 |
| | c. S1/D4 < 5 Tahun | OB | 1.600.000 |
| | d. Diploma I/II/III | OB | 1.250.000 |
| | e. SLTA /setara | OB | 900.000 |
| | f. SLTP/setara | OB | 750.000 |
| | g. SD/ setara | OB | 700.000 |
| | | | |
| 21. | HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN | | |
| | a. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama | OJ | 60.000 |
| | b. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya | OJ | 50.000 |
| | c. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda | OJ | 40.000 |
| | d. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama | OJ | 35.000 |
| | | | |
| 22. | HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN | | |
| | a. Pembantu Penelitian/Perekayasaan | OJ | 25.000 |
| | b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan | OB | 420.000 |
| | c. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan | OB | 420.000 |
| | d. Pengolah Data | Penelitian/ Perekayasaan | 1.540.000 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|------------|
| | e. Petugas Survey | OR | 7.000 |
| | f. Pembantu Lapangan | OH | 80.000 |
| 23. | SATUAN MAKAN MINUM | | |
| | 23.1. Makan minum harian | OH | 30.000 |
| | 23.2. Makan minum rapat | | |
| | a. Makan (prasmanan) | Orang/Kali | 40.000 |
| | b. Makan (nasi kotak) | Orang/Kali | 35.000 |
| | c. Snack | Orang/Kali | 12.000 |
| 24. | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR | | |
| | a. Pemeliharaan AC Split | Unit/Tahun | 750.000 |
| | b. Pemeliharaan AC Standing | Unit/Tahun | 1.600.000 |
| | c. Genset lebih kecil dari 50 Kva | Unit/Tahun | 6.000.000 |
| 25. | SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTOCOPY | | |
| | 25.1. Jilid | | |
| | a. Jilid Album | Buah | 35.000 |
| | b. Jilid Spiral | Buah | 25.000 |
| | c. Jilid Biasa | Buah | 15.000 |
| | d. Jilid Hard Cover ukuran A4 | Buah | 35.000 |
| | e. Jilid Soft Cover ukuran A 4 | Buah | 25.000 |
| | f. Jilid Hard Cober ukuran F4 | Buah | 45.000 |
| | g. Jilid Sift Cover ukuran F4 | Buah | 35.000 |
| | h. Jilid Hard Cober ukuran ½ F4 | Buah | 30.000 |
| | i. Jilid Soft Cover uuran ½ F4 | Buah | 20.000 |
| | 25.2 Fotocopy | | |
| | a. Fotocopy HVS Hitam Putih | Page/hal | 200 |
| | b. Fotocopy HVS warna | Page/hal | 700 |
| | c. Art Paper | Page/hal | 4.000 |
| 26. | HONORARIUM SERTIFIKASI BATU MULIA | | |
| | a. Petugas Tenaga Ahli Batu | OB | 1.400.000 |
| | b. Tenaga Ahli Desain | OB | 1.500.000 |
| | c. Pengrajin Penggosok Batu Permata | OB | 1.500.000 |
| | d. Pengrajin Kamasan | OB | 1.500.000 |
| | e. Pengrajin Cating | OB | 1.500.000 |
| 27. | HONORARIUM ADVOKAT PADA LKH KORPRI | | |
| | Honorarium Advokat dalam penanganan perkara pada LKBH Korpri | Paket/ perkara | 35.000.000 |
| 28. | HONORARIUM POKJA ULP | | |
| | 28.1. Barang dan Jasa Lainnya | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta | Paket | 1.500.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M | Paket | 1.800.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar | Paket | 2.100.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M | Paket | 2.500.000 |

| | | | |
|-----|--|----------|------------|
| | s.d Rp. 5 M | | |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M | Paket | 3.000.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M | Paket | 3.500.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M | Paket | 4.000.000 |
| | | | |
| | 28.2. Konstruksi | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta | Paket | 2.000.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M | Paket | 2.500.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar | Paket | 3.000.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M | Paket | 4.000.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M | Paket | 5.000.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M | Paket | 6.000.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M | Paket | 7.000.000 |
| | | | |
| | 28.3. Konsultasi | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan 50 juta s.d Rp. 100 juta | Paket | 2.000.000 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d 200 juta | Paket | 2.500.000 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 M | Paket | 3.000.000 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M | Paket | 4.000.000 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M | Paket | 5.000.000 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M | Paket | 6.000.000 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M | Paket | 7.000.000 |
| | | | |
| 29. | BIAYA KEGIATAN HARI JADI / KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS | | |
| | 29.1. Belanja sewa generator | | |
| | Sewa genset | Paket | 7.500.000 |
| | 29.2. Belanja sewa tenda | | |
| | a. Sewa tenda | Buah | 400.000 |
| | b. Sewa tenda | Permeter | 50.000 |
| | 29.3. Belanja sewa peralatan studio dan komunikasi | | |
| | a. Sewa sound system | Paket | 10.000.000 |
| | a. Sewa pakaian adat/tradisional | Paket | 5.000.000 |
| | 29.4. Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan | | |
| | a. Sewa panggung besi | Paket | 10.000.000 |

| | | | |
|-----|---|-------|------------|
| | b. Sewa taman hidup | Paket | 2.500.000 |
| | c. Sewa Bunga hidup (podium/meja) | Buah | 500.000 |
| | d. Sewa air gucci/hiasan | Paket | 5.000.000 |
| | e. Sewa AC | Buah | 1.500.000 |
| | f. Sewa kipas angin salju | Buah | 750.000 |
| | | | |
| 30. | BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA | | |
| | 30.1. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati | Bulan | 19.450.000 |
| | 30.2. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati | Bulan | 13.450.000 |
| | | | |

Keterangan :

- a. OJ = orang jam
- b. OH = orang hari
- c. OK = orang kali
- d. OB = orang bulan
- e. OP = orang paket
- f. OT = orang triwulan
- g. OS = orang semester
- h. OM = orang moderator

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2015
TANGGAL 16 Desember 2015

PENJELASAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan Staf Pengelola, Pengurus dan Penyimpan Barang, Pembantu pengurus dan Penyimpan Barang diberikan berdasarkan besaran pagu atau nilai aset yang dikelola untuk setiap DPA SKPD.

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah 50 juta dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari 50 juta dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.

2.2. Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

2.3. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium diberikan setelah pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibayarkan perpaket untuk Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan pagu pengadaan.

2.4. Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5. Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku (mengawasi

pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan gedung, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

3. HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Banjar untuk mengelola Gaji seluruh SKPD lingkup Kabupaten Banjar.

4. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PANITIA SEMINAR/ RAPAT KORDINASI/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber dari Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten dapat diberikan kepada PNS/TNI/Polri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/RapatKerja /Sarasehan /Simposium /Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek /Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium Lokakarya/ Focus Group Discussion /kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara, dan
 - b. Berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.

b. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium / Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD Penyelenggara/masyarakat.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi /Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium Lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara; atau
 - b. Berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD

penyelenggara/masyarakat.

c. Honorarium Panitia Bimtek /Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi /Workshop/ Rapat Kerja / sarasehan / Simposium/ Lokakarya/ FGD

1) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati/ Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara /masyarakat.

2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas memerlukan tambahan Panitia yang berasal dari Non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

3) Jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium agar mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

d. Honorarium Panitia Diklat

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Diklat penjenjangan/ struktural/ fungsional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

e. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan lainnya.

Honorarium diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/ seleksi/ perlombaan/ peringatan/ kegiatan lainnya yang sejenis, bersifat koordinatif dan melibatkan SKPD/ Instansi/pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Honorarium diberikan perkegiatan.

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan yang dilakukan perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan dan/atau persemesteran dengan berpedoman pada ketentuan pembentukan tim sebagai berikut :

1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. Bersifat koordinatif, temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan keberadaannya dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
3. Melibatkan SKPD/ instansi vertikal diluar SKPD pengusul yang keberadaannya sangat berperan dalam pencapaian keluaran (output);
4. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ KPA diangkat sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di SKPD dan keanggotaannya berasal dari internal SKPD tersebut/ dari luar SKPD sepanjang tingkatan eselonnya dibawah PA/KPA.
 - c. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan yang keberadaannya tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
 - d. Pemberian honorarium Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan dapat dilakukan secara perkegiatan/ perbulan/pertriwulan/persemester yang didasarkan pada beban kerja, out put yang dihasilkan serta waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan asas efisien dan efektifitas.
6. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN PENGELOLA WEBSITE
Honorarium Tim Penyusun Buletin dan Pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara /Tenaga Kontrak yang diberi tugas menyusun Buletin dan mengelola website berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
7. HONORARIUM TIM KOMINDA (KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH)
Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Kominda yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
8. HONORARIUM LAINNYA
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi SKPD.
- a. Honorarium Petugas Survey dan Petugas Lapangan diberikan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas untuk melakukan survey dan petugas lapangan yang dibayarkan perhari.
 - b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat pengambil sumpah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.
 - d. Honorarium Pembawa Acara/MC diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negarayang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai memandu acara/MC dalam Acara Resmi Pemerintahan.
 - e. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk membacakan Doa.

- f. Honorarium Wasit/Juri/Penilai diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Juri/ Wasit/Penilai dalam suatu kegiatan perlombaan/pertandingan/ kejuaraan/penilaian yang diselenggarakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dibayarkan perkegiatan/perhari sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.
- g. Honorarium petugas sensus barang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan sensus barang milik daerah yang dibayarkan perhari.
9. HONORARIUM TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI ASET/ BARANG MILIK DAERAH
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan kegiatan monitoring, dan melaksanakan kompilasi data inventarisasi BMD.
10. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/INTERNASIONAL
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana kegiatan Seminar/ Workshop/Sosialisasi/Diseminasi//Workshop/Sarasehan yang berskala nasional/internasional/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan yang melibatkan peserta dari komponen/ unsur masyarakat dan di luar dari SKPD penyelenggara.
11. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.
12. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
13. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
- Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat Dasar dan Menengah. Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
 - Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun/pembuat naskah soal ujian, pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian. Satuan biaya pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian sudah termasuk uang transport.

14. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya pelaksanaan kegiatan rapat/ acara pertemuan yang dilaksanakan di Hotel/ Ruang Pertemuan/ Balai Pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan SKPD atau Instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon II atau dari masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor adalah didasarkan pada lama penyelenggaraan kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- b. Paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.
- c. Paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap.

15. HONORARIUM TENAGA AHLI/ PAKAR

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/ pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang SKPD lingkup Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kab. Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

16. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

- a. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4, roda 6/BUS sedang, roda 4/BUS besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

- (1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

- b. Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/Operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa

selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak dapat berfungsi), sehingga atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan :

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

17. HONORARIUM OPERATOR PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)
Honorarium yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas sebagai operator produk hukum daerah berdasarkan Keputusan dari Pejabat yang berwenang.
18. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSFORTASI PESERTA
Satuan biaya uang saku/ transfortasi peserta diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari masyarakat/ Non Pegawai ASN.
19. HONORARIUM PELATIH
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai Pelatih sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada SKPD.
20. HONORARIUM PETUGAS
 - a. Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kontrak/ Non Pegawai ASN berdasarkan jenis pekerjaan dan berdasarkan jenis pendidikan.
 - b. Berdasarkan jenis pekerjaan honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Operator Website, Satpam, pengemudi/sopir, pengemudi sopir kendaraan operasional khusus, petugas kebersihan lapangan/sampah/kantor dan pramubakti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
 - c. Untuk Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
 - d. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan kesejahteraan.
 - e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam PMK, maka satuan biaya ini dapat

dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

21. HONORARIUM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN
Honorarium yang diberikan kepada fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana yang diberi tugas berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan paling banyak 4 (empat) jam sehari tanpa diberikan uang lembur dan uang lembur makan.
22. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN
Honorarium yang diberikan kepada pegawai ASN/ Non Pegawai ASN/ Tenaga Kontrak yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana sebagai pembantu, koordinator, sekretariat penelitian/ perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.
23. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM
Satuan biaya makan minum pegawai (Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak/Non Pegawai ASN) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran kerja. Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang diundang.
24. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya ac split, ac standing dan genset agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya pembelian spare part dengan memperhatikan umur dari sarana kantor yang digunakan. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
25. SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTOCOPY
26. HONORARIUM SERTIFIKASI BATU MULIA
Honorarium diberikan kepada petugas atau tenaga ahli yang terkait dengan proses penerbitan sertifikasi batu mulia atau pengrajin batu mulia.
27. HONORARIUM ADVOKAT LKBH KORPRI
Honorarium yang diberikan kepada advokat yang ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk menangani perkara/ permasalahan hukum yang dialami oleh PNS Kabupaten Banjar dan juga oleh Korpri Daerah .
Pembayaran honorarium dilakukan dalam 2 tahap:
 - Tahap I sebesar 50 % sejak dilaksanakan pendampingan;
 - Tahap II sebesar 50 % pada saat putusan atau perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dihentikanya perkara.
28. HONORARIUM POKJA ULP
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai

Pokja ULP untuk melakukan proses pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

29. SATUAN BIAYA UNTUK KEGIATAN HARI JADI/ KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS

30. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Satuan biaya makan minum perbulan untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati. Satuan biaya makan dan minum dimaksud termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI